



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan bagi Pemerintah Daerah dimana Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur eksekutif dimana dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerjanya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan harus menyusun suatu program kerja menurut tugas pokok dan fungsinya. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai, hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan pada Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene pada Tahun 2024 ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene pada Tahun 2024.

Selanjutnya kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene pada Tahun 2024, kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Majene, 25 Mei 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah



M. DJAZULI M. SP.,MH
NIP. 19690703 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021 - 2026.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah	23
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene periode tahun 2021-2026, RPJP, RPJMD Provinsi dan Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Majene Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja OPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah taentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Menyebutkan bahwa :

1. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1).

2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
3. Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
4. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja OPD Tahun 2024 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majene tahun 2024 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2024. Disamping mengacu pada RKPD Tahun 2024, penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2026. Diharapkan rancangan Renja yang akan disempurnakan pasca penyelenggaraan Forum Gabungan OPD akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2024. Selain itu Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 juga mengacu pada Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majene dan Renstra OPD Badan Pendapatan Daerah, memuat kerangka pengelolaan anggaran pendapatan daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Majene. Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di

lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.

Oleh karena itu program – program pendapatan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA - APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Majene Tahun 2024 yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Majene Tahun 2024, khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene. Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pendapatan daerah tahun 2024 di Kabupaten Majene.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tahun 2024 yang disusun merupakan bagian integral dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026. Untuk itu penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene harus dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene yang telah dirumuskan dalam RPJMD dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tahun 2024 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Majene.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012-2032.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkantoran.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pajak Sarang Burung Walet.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pajak Penerangan Jalan.
28. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 38 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Mejene Tahun 2021-2026.
30. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
31. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 adalah untuk memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majene tahun 2024 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tahun anggaran 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah :

- a. Sebagai acuan/arah bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2024.
- b. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene pada tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU, pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Badan Pendapatan Daerah 2021 - 2026.**

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan–kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Renja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene pada Tahun 2022 memuat 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Total alokasi anggaran sebesar Rp. 8.545.522.447,- yang terdiri dari Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA DAERAH	Rp. 8.545.522.447	Rp. 7.699.342.886	
TOTAL		Rp. 8.545.522.447	Rp. 7.699.342.886	90,10

Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene pada Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, Terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Nilai AKIP OPD, Indeks Kepuasan Masyarakat. Sasaran I ditunjang dengan 1 (satu) program. Berikut capaian kinerja Sasaran I tersaji pada tabel :

No	Sasaran Strategis	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	97,03	97,80
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah				

2. Sasaran II : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan dan Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Terhadap Target Pajak dan Retribusi. Sasaran II ditunjang dengan 1 (satu) program. Berikut capaian kinerja Sasaran II tersaji pada tabel :

No	Sasaran Strategis	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	42,16	83,98

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene dan pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene sampai dengan tahun berjalan disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja
Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021/Baseline)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah							
	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah subkegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan							
		01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan	12	2	2	100	2	2	50,00
		02		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	6	1	1	100	1	1	50,00
		03		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	6	1	1	100	1	1	50,00
		04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	6	1	1	100	1	1	50,00
		05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	6	1	1	100	1	1	50,00
		06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12	2	1	100	2	2	41,67
		07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP	24	4	4	100	4	4	50,00
	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah subkegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan							
		01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi gaji dan tunjangan	4608	768	768	100	768	768	50,00
		02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah OB tenaga administrasi yang dibayarkan	10368	1728	1728	100	1728	1728	50,00
		03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah OB tenaga yang dibayarkan	72	12	12	100	12	12	50,00
		04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi yang disusun	24	4	4	100	4	4	50,00

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021/Baseline)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	6	1	1	1	100	1	1	50,00
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran yang disusun	72	12	12	12	100	12	12	50,00
2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Subkegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan								
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	320	90	34	30	88	64	64	57,50
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tugas dan fungsinya	14	2	2	2	100	25	25	207,14
		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	7	200	100	100	100	200	200	7142,86
2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Subkegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan								
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	17	18	0	0	0	5	5	135,29
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan	228	38	38	38	100	38	38	50,00
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan	25	4	4	4	100	48	48	224,00
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	720	119	120	110	92	120	100	45,69
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1668	276	278	278	100	278	250	48,20
2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan								

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021/Baseline)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	56	4	0	0	0	8	8	21,43
2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Subkegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan								
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	10122	1687	1687	1550	92	1687	1587	47,66
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	72	12	12	12	100	12	12	50,00
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah OB jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	1800	300	300	300	100	312	312	50,67
2	08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah subkegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan								
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	72	12	12	12	100	1	1	34,72
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	2676	440	446	446	100	446	396	47,91
		05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	336	56	56	50	89	56	46	45,24
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18	1	3	3	100	10	10	77,78
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	12	2	2	2	100	2	2	50,00
04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah								
2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Subkegiatan Pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021/Baseline)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
			01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen target pendapatan Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak tambang batuan mineral bukan logam.	36	6	6	6	100	2	2	38,89
			02	Analisa dan Penegembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah baru dan laporan penggunaan MPOS melalui uji petik	36	6	4	4	100	6	6	44,44
			03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah ranperda yang disahkan menjadi perda	6	1	2	2	100	1	1	66,67
			05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek wajib Pajak reklame, Pajak tambang batuan mineral bukan logam	1500	152	1	1	100	6	6	10,60
					Jumlah objek wajib Pajak restoran pajak hiburan, Pajak hotel	576	89	250	250	100	0	0	58,85
			06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi pendapatan yang disusun	126	20	96	106	109	21	21	116,67
					Laporan kinerja manajemen pendapatan daerah			12	12				
					Laporan monev			4	4				
					Laporan realisasi pendapatan akhir tahun			4	4				
			07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kolektor yang menerima insentif	2268	378	1	1	999	378	378	33,38
					Jumlah objek wajib Pajak PBB	354930	68032	100	156		59155	59155	35,88
					Jumlah SKP BPHTB yang dinilai dan ditetapkan	3900	549	59155	594416		650	650	15272,18
					Jumlah SPPT	354930	59464	650	432		59155	59155	33,54
					Laporan BPHTB	24	4	59155	594416		4	4	2476766,67
					Pemutakhiran Data PBB P2	43805	-	4	4		6060	6060	13,84
			09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan konsultasi da harmonisasi dengan provinsi	24	4	4	4	100	4	4	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021/Baseline)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Laporan Konsultasi dan pendampingan KPK, BPK, dan BPKP	12	2	3	2	67	2	2	50,00
	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan rekonsiliasi penerimaan Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak tambang batuan bukan logam	216	36	36	100	32	32	48,15
		Laporan rekonsiliasi sumber-sumber PAD	864	122	144	144	100	0	0	30,79
	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SKP Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak tambang mineral bukan logam yang dinilai dan ditetapkan	2400	480	400	381	95	400	52,54
		Jumlah SKP Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak hotel yang diterbitkan	6918	1521	1152	1689	147	1153	1153	63,07
		Jumlah SKP Pajak sarang burung walet yang diterbitkan	420	59	70	52	74	70	65	41,90
	12	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Jumlah kendaraan dinas yang menunggak PKB	2700	260	450	362	80	20	23,78
	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pajak reklame, Pajak Penerang Jalan, Pajak tambang batuan mineral bukan logam	72	12	12	12	100	5	40,28
		Laporan Pajak restoran, Pajak hotel, Pajak hiburan	72	12	12	12	100	0	0	33,33
		Laporan Pajak sarang burung walet	24	4	4	4	100	0	0	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021/Baseline)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
14	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah SKR Retribusi Mess Pemda dan retribusi pertokoan yang diterbitkan	5616	935	936	21	2	10	10	17,20
		Jumlah SKR Retribusi rumah dinas yang diterbitkan	6120	1020	1020	996	98	25	25	33,35
		Laporan Mess Pemda dan Retribusi pertokoan yang terbit	48	8	8	4	50	4	4	33,33
		Laporan Retribusi rumah dinas yang terbit	24	4	4	4	100	0	0	33,33



Majene, 25 Mei 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.Majene

M. DJAZULI M, SP.,MH

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690703 199803 1 007

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene

Capaian kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2026. Uraian Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah, sebagaimana terdapat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majene

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI		ANALISIS CAPAIAN
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Nilai AKIP OPD		Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	80,00	80,00	85,00	90,00	90,00	90,00	n/a	n/a	-	-	-	-	90	90	
2	Indeks Kepuasan masyarakat			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	n/a	n/a	-	-	-	-	75	75	
3	Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan		Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	90,00	94,00	95,00	97,00	99,00	100,00	100,33	83,98	-	-	-	-	100	100	
4	Persentase realisasi pajak dan retribusi terhadap target pajak dan retribusi			90,00	94,00	95,00	97,00	99,00	100,00	61,32	92,85	-	-	-	-	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Badan Pendapatan Daerah di dukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Lemahnya manajemen pendapatan daerah yang meliputi : sarana dan prasarana, jumlah pegawai pemungut pendapatan.
2. Peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Penguatan Kelembagaan Badan Pendapatan Daerah
4. Kecilnya kontribusi rata-rata penerimaan PAD terhadap total pendapatan daerah.
5. Regulasi tentang struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah.
6. Masih belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan kinerja Badan Pendapatan daerah. Faktor- faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

- a. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Badan Pendapatan, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- b. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

- a. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten.
- b. Belum optimalnya penggalian data sumber-sumber potensi Pendapatan Daerah.
- c. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan di lakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Badan Pendapatan Daerah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Majene

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		RANCANGAN AWAL RKPD			LOKASI	INDIKATOR KINERJA		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
		Program/Outcome (Hasil)	Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output (Keluaran)	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Program/Outcome (Hasil)	Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output (Keluaran)	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	16.187.876.326,00			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	10.996.744.722,14	
2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	180.000.000,00			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah subkegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	180.000.000,00	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	APBD II
	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD II
	03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD II
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD II
	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD II
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	APBD II
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	60.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	60.000.000,00	APBD II
2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	7.955.322.518,00			Persentase kelancaran administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah subkegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	4.998.094.000,14	
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	768 Orang/Bulan	6.992.322.518,00	APBD II	Majene		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	768 Orang/Bulan	4.493.494.000,14	APBD II
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	870.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	411.400.000,00	APBD II
			Jumlah OB tenaga administrasi yang dibayarkan	1728 Orang/Bulan			Majene		Jumlah OB tenaga administrasi yang dibayarkan	1728 Orang/Bulan		
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.000.000,00	APBD II
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	20.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	20.000.000,00	APBD II
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24.000.000,00	APBD II
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	APBD II
2	05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pegawai lengkap administrasi kepegawalan pada Perangkat Daerah	100%	280.500.000,00			Persentase pegawai lengkap administrasi kepegawalan pada Perangkat Daerah	Jumlah Subkegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	280.500.000,00	
	02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	64 Paket	30.500.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	64 Paket	30.500.000,00	APBD II
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	150.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	150.000.000,00	APBD II
	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150 Orang	100.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150 Orang	100.000.000,00	APBD II
			Jumlah Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	1 Peraturan			Majene		Jumlah Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	1 Peraturan		
2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	931.000.000,00			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Subkegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	731.000.000,00	
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000,00	APBD II
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket	300.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket	300.000.000,00	APBD II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan			INDIKATOR KINERJA		RANCANGAN AWAL RKPD			LOKASI	INDIKATOR KINERJA		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
				Program/Outcome (Hasil)	Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output (Keluaran)	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Program/Outcome (Hasil)	Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output (Keluaran)	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	16.000.000,00	APBD II	Mojene		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	16.000.000,00	APBD II
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	120 Laporan	90.000.000,00	APBD II	Mojene		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	120 Laporan	90.000.000,00	APBD II
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278 Laporan	225.000.000,00	APBD II	Mojene		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278 Laporan	225.000.000,00	APBD II
2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	30.000.000,00				Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	13.150.722,00	
		05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	30.000.000,00	APBD II	Mojene		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	13.150.722,00	APBD II
2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Subkegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	5.436.053.808,00				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Subkegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	4.584.000.000,00	
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1687 Laporan	20.000.000,00	APBD II	Mojene		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1687 Laporan	20.000.000,00	APBD II
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.252.053.808,00	APBD II	Mojene		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.500.000.000,00	APBD II
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	164.000.000,00	APBD II	Mojene		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	64.000.000,00	APBD II
					Jumlah OB jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	312 OB			Mojene		Jumlah OB jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	312 OB		
2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah subkegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan	100%	375.000.000,00				Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah subkegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan	100%	210.000.000,00	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.000.000,00	APBD II	Mojene		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.000.000,00	APBD II
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	446 Unit	130.000.000,00	APBD II	Mojene		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	446 Unit	65.000.000,00	APBD II
		05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	56 Unit	10.000.000,00	APBD II	Mojene		Jumlah Mebel yang Dipelihara	56 Unit	10.000.000,00	APBD II
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	50.000.000,00	APBD II	Mojene		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	50.000.000,00	APBD II
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00	APBD II	Mojene		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000,00	APBD II
04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah			100%	1.577.849.278,00			Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah		100%	1.577.849.278,00	
2	01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah subkegiatan Pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan	100%	1.577.849.278,00				Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah subkegiatan Pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan	100%	1.577.849.278,00	
		01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baik di APBD POKOK dan APBD Perubahan	2 Dokumen	50.043.451,00	APBD II	Mojene		Jumlah Dokumen Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baik di APBD POKOK dan APBD Perubahan	2 Dokumen	50.043.451,00	APBD II
		02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah baru	2 Laporan	78.672.321,00	APBD II	Mojene		Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah baru	2 Laporan	78.672.321,00	APBD II
					Laporan penggunaan MPOS melalui uji petik	6 Laporan					Laporan penggunaan MPOS melalui uji petik	6 Laporan		
		05	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah ranperda yang disahkan menjadi perda	1 Perda	92.614.943,00	APBD II	Mojene		Jumlah ranperda yang disahkan menjadi perda	1 Perda	92.614.943,00	APBD II
		06	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Jenis Pajak Daerah	6 Jenis	187.928.256,00	APBD II	Mojene		Jumlah Jenis Pajak Daerah	6 Jenis	187.928.256,00	APBD II
		06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi pendapatan yang disusun	21 Laporan	50.503.771,00	APBD II	Mojene		Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi pendapatan yang disusun	21 Laporan	50.503.771,00	APBD II
					Laporan kinerja manajemen pendapatan daerah						Laporan kinerja manajemen pendapatan daerah			
					Laporan manev						Laporan manev			
					Laporan realisasi pendapatan akhir tahun						Laporan realisasi pendapatan akhir tahun			
		07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah kolektor yang menerima insentif	378 Orang					Jumlah kolektor yang menerima insentif	378 Orang		
					Jumlah objek wajib Pajak PBB	59155 Objek					Jumlah objek wajib Pajak PBB	59155 Objek		
					Jumlah SKP BPHTB yang dinilai dan ditetapkan	650 SKP	385.992.264,00	APBD II	Mojene		Jumlah SKP BPHTB yang dinilai dan ditetapkan	650 SKP	385.992.264,00	APBD II
					Jumlah SPPT	59155 SPPT					Jumlah SPPT	59155 SPPT		
					Laporan BPHTB	4 Laporan					Laporan BPHTB	4 Laporan		
					Pemutakhiran Data PBB P2	6060 Objek					Pemutakhiran Data PBB P2	6060 Objek		
		09	Pelaksanaan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah pelaksanaan konsultasi da harmonisasi dengan provinsi	4 Kali	41.040.000,00	APBD II	Mojene		Jumlah pelaksanaan konsultasi da harmonisasi dengan provinsi	4 Kali	41.040.000,00	APBD II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		RANCANGAN AWAL RKPD			LOKASI	INDIKATOR KINERJA		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
		Program/Outcome (Hasil)	Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output (Keluaran)	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Program/Outcome (Hasil)	Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output (Keluaran)	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
			Laporan Konsultasi dan pendampingan KPK, BPK, dan BPKP	2 Laporan					Laporan Konsultasi dan pendampingan KPK, BPK, dan BPKP	2 Laporan		
	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	32 Laporan	56.455.706,00	APBD II	Majene		Laporan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	32 Laporan	56.455.706,00	APBD II
	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SKP Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak tambang mineral bukan logam yang dinilai dan ditetapkan	400 SKP	80.881.918,00	APBD II	Majene		Jumlah SKP Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak tambang mineral bukan logam yang dinilai dan ditetapkan	400 SKP	80.881.918,00	APBD II
			Jumlah SKP Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak hotel yang diterbitkan	1153 SKP					Jumlah SKP Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak hotel yang diterbitkan	1153 SKP		
			Jumlah SKP Pajak sarang burung walet yang diterbitkan	70 SKP					Jumlah SKP Pajak sarang burung walet yang diterbitkan	70 SKP		
	12	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20 Dokumen	20.196.832,00	APBD II	Majene		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20 Dokumen	20.196.832,00	APBD II
	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak Daerah Yang Akan Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	5 Pajak Daerah	258.960.810,00	APBD II	Majene		Jumlah Jenis Pajak Daerah Yang Akan Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	5 Pajak Daerah	258.960.810,00	APBD II
	14	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Pengelola Mess Pemda	10 Orang	49.539.006,00	APBD II	Majene		Jumlah Pengelola Mess Pemda	10 Orang	49.539.006,00	APBD II
			Jumlah Wajib Retribusi Rumah Dinas	25 Wajib Retribusi					Jumlah Wajib Retribusi Rumah Dinas	25 Wajib Retribusi		
			Laporan Mess Pemda yang terbit	4 Laporan					Laporan Mess Pemda yang terbit	4 Laporan		
	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Kanal Pembayaran Pajak Daerah	7 Kanal Pembayaran	50.000.000,00	APBD II	Majene		Jumlah Kanal Pembayaran Pajak Daerah	7 Kanal Pembayaran	50.000.000,00	APBD II
			Jumlah Jenis Pajak Daerah	4 Jenis Pajak	50.000.000,00				Jumlah Jenis Pajak Daerah	4 Jenis Pajak	50.000.000,00	
			Jumlah Jenis Retribusi Daerah	2 Jenis Retribusi	25.000.000,00				Jumlah Jenis Retribusi Daerah	2 Jenis Retribusi	25.000.000,00	
			Jumlah Event	2 Event	100.000.000,00				Jumlah Event	2 Event	100.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah merupakan OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepada penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene yang juga selaku Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2024 belum ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG.

BAB III
TUJUAN, SASARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional dan Provinsi di jadikan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah, yang dipadukan dengan Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 terutama keterpaduan dalam program dan kegiatan serta sasaran target yang akan dicapai.

Badan Pendapatan Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepada penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah. Program dan Kegiatan yang disusun dalam Renja Badan Pendapatan Daerah mengarah pada koordinasi yang selaras dengan kebijakan nasional yang mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nawa Cita, antara lain :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu, program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024, selaras dengan isu strategis Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun isu strategis Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah

Kebijakan ini diarahkan pada pemantapan kinerja organisasi yang didukung oleh sistem dan suasana kerja yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu hal yang mendasar sebagai koordinator pengelola pendapatan daerah adalah koordinasi lintas SKPD, sinergi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat serta seluruh *stakeholders* yang terkait dalam peningkatan pendapatan daerah.

2. Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Aparatur

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur yang profesional dalam sumber-sumber pendapatan daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Kebijakan ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah secara efektif dan efisien dalam rangka memenuhi kebutuhan *fiscal* daerah sesuai target yang ditetapkan.

4. Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan Dinas Pendapatan Daerah yang didasarkan pada akuntabilitas dan transparansi dengan dukungan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan, sarana dan prasarana yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima.

5. Pemanfaatan Regulasi Pendapatan Daerah

Kebijakan ini diarahkan pada upaya pembentukan regulasi pendapatan daerah, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap regulasi pendapatan daerah serta penegakan atas regulasi pendapatan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daaerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Kabupaten Majene Tahun 2021-2026, yaitu:

Majene Unggul, Mandiri dan Religius

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Majene Unggul :

Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Majene Mandiri :

Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri.

Majene Religius :

Bermakna bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Majene yang mengamalkan nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, budaya dan kearifan lokal yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Dengan demikian visi Terwujudnya Kabupaten Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius bermakna Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang berbasis pada kemandirian yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat religius sebagai perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat yang aman, tenteram dan nyaman".

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Majene tahun 2021 – 2026. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Adapun Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Aman Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum dan ketentraman serta melestarikan budaya masyarakat yang malaqbi'.

Sejahtera Mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas dan sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi yang progresif dengan memaksimalkan sumber daya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan investasi yang bertumpu pada potensi lokal dan regional, ramah lingkungan dan berkesinambungan

Terarah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien melalui peningkatan mutu birokrasi dengan menerapkan e-government yang holistik dan terintegrasi disegala sektor pelayanan publik.
Agromarine	Mengoptimalkan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya potensi lokal di darat dan laut, meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, perhubungan, pertambangan dan pariwisata.
Responsif	Mengakselerasi perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui layanan yang aspiratif, cepat tanggap, bermutu dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
Inovatif	Mendorong pengembangan UMKM, industri kreatif dan sektor jasa berbasis teknologi informasi.
Sustainable	Mengembangkan infrastruktur publik berbasis Perencanaan wilayah yang berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana bidang administrasi pendapatan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berperan sebagai satuan kerja pengelola pendapatan daerah. Memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah untuk tahun 2024, disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan dan sasaran strategis yang dirancang, selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam Program dan Kegiatan tahunan OPD, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi atau dimiliki.

Tujuan OPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Tujuan OPD akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Sasaran OPD merupakan penjabaran tujuan OPD yang secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan OPD.

Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021, telah dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran untuk rencana kerja tahun 2022. Dalam rumusan tersebut disajikan dalam bentuk tabel 3.1, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	90
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah	Indeks Kepuasan masyarakat	75
2	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan	Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	97
			Persentase realisasi pajak dan retribusi terhadap target pajak dan retribusi	97

3.3 Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Faktor untuk pencapaian visi, misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah;
2. Faktor pencapaian standar pelayanan tupoksi OPD;
3. Faktor Isu penyelenggaraan Tugas Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene;
4. Faktor Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene; dan
5. Faktor program dan kegiatan rutinitas/oprasional OPD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Badan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan Badan Pendapatan Daerah yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 terdapat 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan dan sub kegiatan, maka pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan indikator kinerja. Perumusan kegiatan dan sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 4. Fasilitas Kunjungan Tamu.
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Pengadaan Mebel.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 3. Pemeliharaan Mebel.
 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
 4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
 5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
 6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
 8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
 9. Penagihan Pajak Daerah.
 10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
 11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
 12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.
 13. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat (APBD I) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene (APBD II).

Selanjutnya, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diatas di uraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Majene

OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			Program/Outcome (Hasil)	Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output (Keluaran)		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	13.323.964.722,00				13.725.821.518,00
	2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah subkegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	180.000.000,00				194.999.000,00
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Majene	2 Dokumen	15.000.000,00	APBD II	2 Dokumen	10.000.000,00
		02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Majene	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD II	1 Dokumen	28.999.000,00
		03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Majene	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD II	1 Dokumen	25.000.000,00
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Majene	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD II	1 Dokumen	25.000.000,00
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Majene	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD II	1 Dokumen	25.000.000,00
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Majene	2 Laporan	15.000.000,00	APBD II	2 Laporan	15.000.000,00
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Majene	4 Laporan	60.000.000,00	APBD II	4 Laporan	66.000.000,00
	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah subkegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	4.998.094.000,00				8.122.322.518,00
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Majene	768 Orang/Bulan	4.493.494.000,00	APBD II	768 Orang/Bulan	7.392.322.518,00
		02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Majene	12 Dokumen	411.600.000,00	APBD II	12 Dokumen	620.000.000,00
					Jumlah OB tenaga administrasi yang dibayarkan	Majene	1728 Orang/Bulan			1728 Orang/Bulan	
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Majene	12 Dokumen	24.000.000,00	APBD II	12 Dokumen	29.000.000,00
		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Majene	4 Dokumen	20.000.000,00	APBD II	4 Dokumen	25.000.000,00
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Majene	1 Laporan	24.000.000,00	APBD II	1 Laporan	29.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					Program/Outcome (Hasil)	Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output (Keluaran)		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Majene	12 Laporan	25.000.000,00	APBD II		12 Laporan	27.000.000,00
2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai lengkap administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Jumlah Subkegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	120.000.000,00				335.500.000,00
			02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Majene	- Paket	-	APBD II		64 Paket	35.500.000,00
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Majene	5 Orang	20.000.000,00	APBD II		25 Orang	150.000.000,00
			10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Majene		100.000.000,00	APBD II		200 Orang	150.000.000,00
						- Sosialisasi Tentang Pajak Daerah		50 Orang					
						- Sosialisasi Tentang Retribusi Daerah		50 Orang					
						Jumlah Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	Majene	2 Peraturan				1 Peraturan	
2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Subkegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	3.338.720.000,00				990.000.000,00
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Majene	15 Paket	100.000.000,00	APBD II		3 Paket	250.000.000,00
						Jumlah Paket Kendaraan Dinas Roda Dua Untuk Lurah 20 Unit dan Kepala Lingkungan 119 Unit		139 Paket	2.707.720.000,00				
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Majene	38 Paket	200.000.000,00	APBD II		38 Paket	300.000.000,00
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Majene	4 Dokumen	16.000.000,00	APBD II		4 Dokumen	20.000.000,00
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Majene	120 Laporan	90.000.000,00	APBD II		120 Laporan	95.000.000,00
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Majene	278 Laporan	225.000.000,00	APBD II		278 Laporan	325.000.000,00
2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		100%	13.150.722,00				50.000.000,00
			05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Majene	6 Unit	13.150.722,00	APBD II		15 Unit	50.000.000,00
2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Subkegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		100%	4.464.000.000,00				3.593.000.000,00
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Majene	1687 Laporan	20.000.000,00	APBD II		1687 Laporan	30.000.000,00

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				Program/Outcome (Hasil)	Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output (Keluaran)		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Majene	12 Laporan	4.380.000.000,00	APBD II		12 Laporan	3.399.000.000,00
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Majene	12 Laporan	64.000.000,00	APBD II		12 Laporan	164.000.000,00
					Jumlah OB jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Majene	312 OB				312 OB	
2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah subkegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan		100%	210.000.000,00				440.000.000,00
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Majene	1 Unit	35.000.000,00	APBD II		1 Unit	40.000.000,00
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Majene	446 Unit	65.000.000,00	APBD II		446 Unit	130.000.000,00
		05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Majene	56 Unit	10.000.000,00	APBD II		56 Unit	10.000.000,00
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Majene	3 Unit	50.000.000,00	APBD II		3 Unit	60.000.000,00
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Majene	2 Unit	50.000.000,00	APBD II		2 Unit	200.000.000,00
04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah			100%	1.352.849.278,00				1.821.021.052,00
2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah subkegiatan Pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan		100%	1.352.849.278,00				1.821.021.052,00
		01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baik di APBD POKOK dan APBD Perubahan	Majene	2 Dokumen	50.043.451,00	APBD II		2 Dokumen	49.043.451,00
		02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah baru	Majene	2 Laporan	78.672.321,00	APBD II		2 Laporan	85.672.321,00
					Laporan penggunaan MPOS melalui uji petik		6 Laporan				6 Laporan	
		03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah ranperda yang disahkan menjadi perda	Majene	1 Perda	92.614.943,00	APBD II		1 Perda	100.614.943,00
		05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Jenis Pajak Daerah	Majene	6 Jenis	187.928.256,00	APBD II		6 Jenis	190.982.064,00
		06	Pengoiahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi pendapatan yang disusun	Majene	21 Laporan	50.503.771,00	APBD II		21 Laporan	55.796.964,00
					Laporan kinerja manajemen pendapatan daerah							
					Laporan monev							
					Laporan realisasi pendapatan akhir tahun							
					Jumlah kolektor yang menerima insentif		378 Orang				378 Orang	
					Jumlah objek wajib Pajak PBB		59155 Objek				59155 Objek	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				Program/Outcome (Hasil)	Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output (Keluaran)		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
		07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah SKP BPHTB yang dinilai dan ditetapkan	Majene	650 SKP	385.992.264,00	APBD II		650 SKP	485.992.264,00
					Jumlah SPPT		59155 SPPT				59155 SPPT	
					Laporan BPHTB		4 Laporan				4 Laporan	
					Pemutakhiran Data PBB P2		6060 Objek				7575 Objek	
		09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah pelaksanaan konsultasi da harmonisasi dengan provinsi	Majene	4 Kali	41.060.000,00	APBD II		4 Kali	51.060.000,00
					Laporan Konsultasi dan pendampingan KPK, BPK, dan BPKP		2 Laporan				2 Laporan	
		10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Laporan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Majene	32 Laporan	56.455.706,00	APBD II		32 Laporan	65.455.706,00
		11	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah SKP Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak tambang mineral bukan logam yang dinilai dan ditetapkan	Majene	400 SKP	80.881.918,00	APBD II		400 SKP	95.881.918,00
					Jumlah SKP Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak hotel yang diterbitkan		1153 SKP				1153 SKP	
					Jumlah SKP Pajak sarang burung walet yang diterbitkan		70 SKP				70 SKP	
		12	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Majene	20 Dokumen	20.196.832,00	APBD II		20 Dokumen	12.196.832,00
		13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Jenis Pajak Daerah Yang Akan Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Majene	5 Pajak Daerah	258.960.810,00	APBD II		5 Pajak Daerah	273.960.810,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		Program/Outcome (Hasil)	Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output (Keluaran)		Target	Pagu Indikalif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikalif
	14	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Pengelola Mess Pemda	Majene	10 Orang	49.539.006,00	APBD II		10 Orang	59.363.779,00
			Jumlah Wajib Retribusi Rumah Dinas		25 Wajib Retribusi				25 Wajib Retribusi	
			Laporan Mess Pemda yang terbit		4 Laporan				4 Laporan	
	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Kanal Pembayaran Pajak Daerah	Majene	- Kanal Pembayaran	-	APBD II		7 Kanal Pembayaran	55.000.000,00
			Jumlah Jenis Pajak Daerah		- Jenis Pajak	-			4 Jenis Pajak	55.000.000,00
			Jumlah Jenis Retribusi Daerah		- Jenis Retribusi	-			2 Jenis Retribusi	35.000.000,00
			Jumlah Event		- Event	-			2 Event	150.000.000,00



Majene, 25 Mei 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.Majene

M. BAJAZULI M. SP. MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690703 199803 1 007

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 merupakan pelaksanaan rencana strategis 2021-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur BAPENDA serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.